

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK MISKIN, JUMLAH PENGANGGURAN,
BELANJA PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMBAS**

Romi Suradi¹, Isna Ayulestari², Hana Dhayan³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

Article History

Received : October 9th 2025
Revised : October 30th 2025
Accepted : November 21st 2025
Available Online : December
11th 2025

Corresponding author*:

romi.suradi@ekonomi.untan.ac.id

Cite This Article: Suradi, R., Ayulestari, I., & Dhayan, H. (2025). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK MISKIN, JUMLAH PENGANGGURAN, BELANJA PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMBAS. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(3). Retrieved from <https://journal.admi.or.id/index.php/JEKMA/article/view/2320>

DOI:

<https://doi.org/10.56127/je.kma.v4i3.2320>

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, belanja pemerintah sektor pendidikan, dan sektor kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Data yang digunakan adalah data time series selama 15 tahun terakhir, yaitu 2010-2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Jumlah pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pendidikan memainkan peran krusial dalam meningkatkan hasil pembangunan manusia, sementara kemiskinan, pengangguran, dan belanja kesehatan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencapai dampak signifikan terhadap kesejahteraan.

Keyword: Kesejahteraan Masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pengangguran, Belanja Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan adalah ukuran yang menunjukkan bahwa masyarakat telah mencapai kondisi sejahtera [1]. Setiap negara memiliki tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk pemerintah Indonesia. Hal ini diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu "untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menciptakan kebijakan pembangunan, termasuk pembangunan manusia. Human Development Report (HDR) menjelaskan pembangunan manusia sebagai upaya memberikan banyak pilihan bagi manusia. Meningkatkan kesejahteraan manusia secara merata, menyeluruh dan berkelanjutan adalah tujuan dari pembangunan manusia. Dalam skala pembangunan nasional maupun daerah, pembangunan manusia menjadi fokus utama karena kualitas manusia merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan [2].

Dalam upaya pembangunan manusia diperlukan suatu indikator untuk merepresentasikan berbagai aspek dan dimensi pembangunan manusia, menganalisis perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah serta perkembangannya sepanjang waktu [3]. Salah satu upayanya adalah menerapkan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pertama kali diterbitkan pada

tahun 1990 oleh United Nation Development Program (UNDP) untuk menilai seberapa baik pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dan menjelaskan bagaimana pembangunan dapat bermanfaat bagi masyarakat seperti hidup sehat, pendidikan yang layak, dan pendapatan yang cukup.

Selama periode 2010-2024, Indonesia mengalami peningkatan IPM dengan rata-rata sebesar 0,77% per tahun. Hal ini berlaku di seluruh dimensi, termasuk umur yang panjang dan sehat, pengetahuan, dan hidup yang layak. IPM Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan dari 59,81 di tahun 2010 menjadi 71,19 di tahun 2024 [4]. Namun, dalam regional Kalimantan, hanya Provinsi Kalimantan Barat yang belum mengalami perubahan status dari kategori sedang menjadi tinggi. Empat provinsi lainnya sudah berubah menjadi IPM kategori tinggi.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan nilai IPM yang paling rendah di Kalimantan, dengan peringkat sebagai berikut: Kalimantan Timur (77,44), Kalimantan Utara (71,83), Kalimantan Selatan (71,84), Kalimantan Tengah (71,63), dan Kalimantan Barat (71,19). Secara nasional, rendahnya angka IPM tersebut menyebabkan Provinsi Kalimantan Barat berada di peringkat 30 dan tidak berubah dari tahun sebelumnya.

Sambas merupakan salah satu kabupaten di antara 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. BPS mencatat bahwa Sambas termasuk salah satu kabupaten yang mengalami pergerakan peningkatan IPM secara signifikan [5]. Sambas merupakan hasil pemekaran kabupaten pada tahun 2000 yang sebelumnya mencakup Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang.

Pada tahun 2001, IPM Kabupaten Sambas berada di urutan kedua terbawah, namun sembilan tahun setelahnya menduduki peringkat kesembilan. Pada tahun 2016-2018 naik menjadi urutan kelima, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2019-2020 menjadi urutan keenam. Dengan semangat pemerintah dan dukungan masyarakat, pada tahun 2022 IPM Kabupaten Sambas kembali meningkat ke urutan kelima. Keberhasilan ini berkat kerja keras pemerintah dan seluruh stakeholder termasuk perguruan tinggi, media massa, sekolah negeri atau swasta beserta masyarakatnya [6].

IPM Kabupaten Sambas dari tahun 2010-2024 mengalami kemajuan setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan 1,07 persen, dari 59,81 di tahun 2010 meningkat menjadi 71,20 di tahun 2024. Setelah mengalami perlambatan di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19, peningkatan IPM Kabupaten Sambas pulih kembali seiring dengan pemulihan kinerja ekonomi. Peningkatan terus-menerus dalam IPM menandakan perubahan yang baik dari kualitas masyarakat di Kabupaten Sambas, yang dapat dilihat dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Peningkatan pembangunan manusia di suatu wilayah dapat terhambat oleh permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Menurut Booth dan McCawley, banyak negara mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapitanya, namun hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmatinya, sementara sebagian besar masyarakat miskin kurang beruntung dan tidak mendapatkan manfaat apapun [7].

Kemiskinan menjadi salah satu bagian penting yang mencerminkan kualitas hidup manusia karena standar hidup yang kurang layak [8]. Menurut Hartono (2022), kemiskinan menjadi dampak serius bagi pembangunan karena merupakan masalah yang rumit dimulai dari masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan fundamental [9]. Dampaknya meluas ke bidang pendidikan dan kesehatan yang seringkali terabaikan akibat keterbatasan ekonomi.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas berfluktuasi setiap tahunnya dengan kecenderungan menurun walaupun tidak signifikan. Tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas sebanyak 50.000 jiwa, menurun di tahun 2011 sebanyak 46.980 sampai di tahun 2013 meningkat sebesar 51.150 jiwa. Selanjutnya terjadi fluktuasi dari tahun 2014 sampai di tahun 2024 sebanyak 35.870 jiwa [10]. World Bank (2019) menyebutkan salah satu faktor utama kemiskinan adalah terbatasnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, akses kesehatan dan pendidikan yang layak.

Dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas berada di peringkat tiga teratas dalam jumlah penduduk miskin [11]. Tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas tidak

terlepas dari pengaruh kondisi sosial dan ekonomi, salah satunya adalah jumlah pengangguran yang bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah pengangguran di Kabupaten Sambas bersifat fluktuatif, dari 7.513 jiwa pada tahun 2010 hingga 17.690 jiwa pada tahun 2024 [12].

Masalah pengangguran selalu berkaitan dengan isu kependudukan. Jumlah pengangguran terus meningkat karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan lajunya pertumbuhan penduduk. Pengangguran mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, kemakmuran dan kesejahteraan [13]. Penurunan tingkat kesejahteraan akan berdampak terhadap ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari intervensi pemerintah dan manusia menjadi modal utama untuk membangun suatu daerah. Pemerintah melakukan belanja atau investasi di bidang pendidikan dan kesehatan yang dianggap berperan dalam membentuk modal manusia dan berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan daerah. Kesehatan sebagai kunci untuk menggapai hidup yang sejahtera dan pendidikan sangat penting untuk meraih hidup yang layak [14]. Alokasi anggaran belanja untuk suatu bidang mencerminkan bahwa pemerintah berkomitmen terhadap adanya masalah dalam bidang tersebut.

Realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan mengalami ketidakstabilan dari tahun ke tahun [15]. Pada tahun 2010, realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan sebanyak Rp. 253.626.650.727 dan meningkat di tahun 2022 sebesar Rp. 588.682.577.298. Sedangkan realisasi belanja pemerintah bidang kesehatan di tahun 2010 sebanyak Rp. 93.322.615.801 dan meningkat di tahun 2022 sebanyak Rp. 355.895.054.914. Peningkatan realisasi belanja pemerintah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya pemerintah daerah untuk pembangunan manusia yang lebih baik dan akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun IPM Kabupaten Sambas selalu meningkat dalam 15 tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih terdapat masalah perekonomian seperti jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran yang selalu berfluktuasi. Selain itu, belanja pemerintah khusus bidang pendidikan dan kesehatan masih belum maksimal, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri [16]. Menurut Todaro dan Smith (2011), kesejahteraan dapat diukur melalui berbagai indikator pembangunan manusia yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan [17]. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan akhir dari seluruh proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara atau wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu umur panjang dan sehat (diukur dengan angka harapan hidup saat lahir), pengetahuan (diukur dengan angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah), serta standar hidup layak (diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan) [18].

IPM memberikan gambaran tentang kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka semakin baik kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut [19].

2.3 Kemiskinan dan Kesejahteraan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat [20]. Kemiskinan memiliki dampak multidimensional terhadap pembangunan manusia, meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki hubungan negatif dengan kesejahteraan masyarakat. Diba et al. (2018) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM di Jawa Timur [21]. Hal serupa juga dikemukakan oleh Azzahra dan Desmawan (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan kemiskinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat [22].

2.4 Pengangguran dan Pembangunan Manusia

Pengangguran adalah keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan [23]. Pengangguran mengurangi produktivitas ekonomi dan berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh pengangguran terhadap IPM. Faizin (2021) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM di Jawa Timur [24]. Namun, Naibaho dan Nabila (2021) menemukan hasil yang tidak signifikan dari pengaruh pengangguran terhadap IPM di Kabupaten Langkat [25].

2.5 Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan

Teori pertumbuhan ekonomi modern menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan sebagai faktor kunci pembangunan ekonomi jangka panjang. Menurut teori modal manusia yang dikemukakan oleh Schultz dan Becker, pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi [26]. Belanja pemerintah di sektor pendidikan mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM. Amar dan Satria (2021) menemukan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Bangka [27]. Hasil serupa juga ditemukan oleh Sanggelorang et al. (2015) di Sulawesi Utara [14] dan Mongan (2019) di Indonesia [28].

2.6 Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia. Investasi di bidang kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi. Belanja pemerintah di sektor kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh belanja kesehatan terhadap IPM. Muliza et al. (2017) menemukan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh [8]. Namun, Fajar dan Indrawati (2020) menemukan hasil yang tidak signifikan dari pengaruh belanja kesehatan terhadap IPM di Kabupaten Cianjur [29].

2.7 Teori Wagner dan Keynesian

Teori Wagner menyatakan bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita, proporsi belanja pemerintah terhadap total output ekonomi akan meningkat. Wagner berpendapat bahwa perkembangan ekonomi akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa publik, sehingga mendorong peningkatan belanja pemerintah [30].

Sementara itu, teori Keynesian menyatakan bahwa belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplier. Menurut Keynes, peningkatan belanja pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat [31].

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat disusun kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk miskin diperkirakan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM)
2. Jumlah pengangguran diperkirakan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM)
3. Belanja pemerintah bidang pendidikan diperkirakan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM)

4. Belanja pemerintah bidang kesehatan diperkirakan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM)

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menguraikan dengan "apa adanya" perihal suatu gejala, variabel atau keadaan tanpa mengubahnya [32]. Sementara itu, pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang memfokuskan pada analisis data numerik atau angka, menggunakan pendekatan model statistika untuk menguji hipotesis, sehingga akan ditemukan tingkat signifikansi dari hubungan antara variabel dalam penelitian [33].

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dengan periode penelitian tahun 2010-2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Barat dan mengalami dinamika pembangunan yang signifikan dalam periode penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Data yang digunakan adalah data time series yang mencakup periode 15 tahun (2010-2024) untuk variabel-variabel berikut:

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- b) Jumlah Penduduk Miskin
- c) Jumlah Pengangguran
- d) Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan
- e) Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM adalah indikator komposit yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Data IPM dinyatakan dalam angka indeks dengan skala 0-100.

3.4.2 Variabel Independen

1. **Jumlah Penduduk Miskin (JPM)** Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data dinyatakan dalam satuan jiwa.
2. **Jumlah Pengangguran (JP)** Jumlah pengangguran adalah jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Data dinyatakan dalam satuan jiwa.
3. **Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan (BPBP)** Belanja pemerintah bidang pendidikan adalah realisasi belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan. Data dinyatakan dalam satuan rupiah.
4. **Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan (BPBK)** Belanja pemerintah bidang kesehatan adalah realisasi belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk fungsi kesehatan. Data dinyatakan dalam satuan rupiah.

3.5 Model Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Model regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model regresi yang dirumuskan adalah:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 JPM_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 BPBP_{it} + \beta_4 BPBK_{it} + \varepsilon_{it} \dots (1)$$

Keterangan:

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia

α = Nilai Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi
 JPM_{it} = Jumlah Penduduk Miskin
 JP_{it} = Jumlah Pengangguran
 $BPBP_{it}$ = Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan
 $BPBK_{it}$ = Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan
 i = Individu/Unit Observasi
 t = Waktu (Tahun)
 ε_{it} = Error term

Untuk memenuhi asumsi linearitas dan mengurangi masalah heteroskedastisitas, dilakukan transformasi logaritma natural (LN) pada variabel independen, sehingga model menjadi:

$$IPM = \alpha + \beta_1 LN_JPM_{it} + \beta_2 LN_JP_{it} + \beta_3 LN_BPBP_{it} + \beta_4 LN_BPBK_{it} + \varepsilon_{it} \dots (2)$$

3.6 Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan model regresi yang digunakan memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), dilakukan beberapa uji asumsi klasik:

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Pengujian dilakukan dengan uji Jarque-Bera dengan kriteria: jika nilai probabilitas Jarque-Bera > 0,05 maka residual berdistribusi normal.

3.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian dilakukan dengan uji White Heteroscedasticity. Jika nilai probabilitas Chi-Square > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Pengujian dilakukan dengan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Jika nilai probabilitas Obs*R-squared > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi.

3.7 Uji Hipotesis

3.7.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian:

- Jika probabilitas < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- Jika probabilitas > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

3.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika probabilitas F -statistic < 0,05 maka semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Estimasi Model Regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda untuk variabel pengaruh jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, belanja pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM tahun 2010-2024, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$IPM_{it} = 1,2941 - 0,0414LN_JPM_{it} + 0,0040LN_JP_{it} + 0,1009LN_BPBP_{it} + 0,0219LN_BPBK_{it} + \varepsilon_{it} \dots (3)$$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

- Nilai koefisien konstanta adalah 1,2941 artinya jika jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, belanja pemerintah bidang pendidikan dan belanja pemerintah bidang kesehatan tidak mengalami perubahan (konstan), maka kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas sebesar 1,2941.
- Koefisien regresi variabel jumlah penduduk miskin yaitu sebesar -0,0414. Artinya, jika jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 1% maka kesejahteraan masyarakat akan menurun sebesar 0,0414 dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).
- Koefisien regresi variabel jumlah pengangguran yaitu sebesar 0,0040. Artinya, jika jumlah pengangguran meningkat sebesar 1% maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0,0040 dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).
- Koefisien regresi variabel belanja pemerintah bidang pendidikan yaitu sebesar 0,1009. Artinya, jika belanja pemerintah bidang pendidikan meningkat sebesar 1% maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0,1009 dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).
- Koefisien regresi variabel belanja pemerintah bidang kesehatan yaitu sebesar 0,0219. Artinya, jika belanja pemerintah bidang kesehatan meningkat sebesar 1% maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0,0219 dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa model yang digunakan telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,6984 yang lebih besar dari 0,05.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Indikator	Nilai
Jarque-Bera	0,7177
Probability	0,6984

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF dari setiap variabel independen kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
LN_JPM	2,6691
LN_JP	1,9832
LN_BPBP	2,9491
LN_BPBK	2,6065

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode White menunjukkan nilai Probabilitas Obs*R-Squared sebesar 0,1249 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 3. Hasil Uji White Heteroskedasticity

Uji Statistik	Nilai	Probabilitas	Nilai Prob.
F-Statistic	2,4955	Prob: F(4,8)	0,1262
Obs*R-squared	7,2165	Prob: Chi-Squared (4)	0,1249

4.2.4 Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai signifikan Probabilitas Obs*R-Squared sebesar 0,1207 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Uji Statistik	Nilai	Probabilitas	Nilai Prob.
F-Statistic	2,4955	Prob: F(4,8)	0,1262
Obs*R-squared	7,2165	Prob: Chi-Squared (4)	0,1249

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji signifikan t dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh variabel jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, belanja pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas.

Tabel 5. Hasil Uji Signifikan t

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas	Keputusan
LN_JPM	-0,0414	-0,3918	0,7054	Tidak Signifikan
LN_JP	0,0040	0,1057	0,9184	Tidak Signifikan
LN_BPBP	0,1009	3,0861	0,0150	Signifikan
LN_BPBK	0,0219	1,2126	0,2599	Tidak Signifikan

Berdasarkan Tabel 5, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. **Variabel Jumlah Penduduk Miskin (LN_JPM)** Dengan nilai t-statistik sebesar -0,3918 dan nilai probabilitas 0,7054 ($> 0,05$) serta nilai koefisien yang negatif, maka jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas.
2. **Variabel Jumlah Pengangguran (LN_JP)** Dengan nilai t-statistik sebesar 0,1057 dan nilai probabilitas 0,9184 ($> 0,05$) serta nilai koefisien yang positif, maka jumlah pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas.
3. **Variabel Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan (LN_BPBP)** Dengan nilai t-statistik sebesar 3,0861 dan nilai probabilitas 0,0150 ($< 0,05$) serta nilai koefisien yang positif, maka belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas.
4. **Variabel Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan (LN_BPBK)** Dengan nilai t-statistik sebesar 1,2126 dan nilai probabilitas 0,2599 ($> 0,05$) serta nilai koefisien yang positif, maka belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas.

4.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji signifikan F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, belanja pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara simultan atau bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas.

Tabel 6. Hasil Uji Signifikan F

Keterangan	Nilai
F-Statistic	13,2880
Prob (F-Statistic)	0,0013

Berdasarkan Tabel 6, nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,0013 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, belanja pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas.

4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat seberapa jauh variabel jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, belanja pemerintah bidang pendidikan dan belanja pemerintah bidang kesehatan dapat menjelaskan variabel kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Keterangan	Nilai
R-squared	0,8691
Adjusted R-squared	0,8037

Berdasarkan Tabel 7, nilai R-squared sebesar 0,8691 atau 86,91% yang artinya variabel kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, belanja pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan sebesar 86,91%, sedangkan sisanya sebesar 13,09% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model seperti investasi swasta, infrastruktur, dan faktor sosial lainnya.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara teoritis kemiskinan memiliki hubungan negatif dengan kesejahteraan, namun dalam konteks Kabupaten Sambas pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik.

Ketidaksignifikan pengaruh ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, dari 50.000 jiwa pada tahun 2010 menjadi 35.870 jiwa pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, meskipun beberapa program masih belum optimal dalam mencapai target sasaran.

Kedua, distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Sambas relatif merata, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Indeks Gini sebesar 0,26 yang mendekati angka 0. Menurut Sen (1999), distribusi pendapatan merupakan aspek penting dalam mengukur pembangunan manusia secara inklusif [34]. Ketimpangan pendapatan yang rendah menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemiskinan, distribusi pendapatan yang relatif merata telah memungkinkan terciptanya kesejahteraan pada tingkat tertentu.

Ketiga, adanya kebijakan redistribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang relatif merata di berbagai sektor. Program-program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, dan program pengentasan kemiskinan lainnya turut berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif kemiskinan terhadap pembangunan manusia, meskipun implementasinya masih perlu diperbaiki.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kiha et al. (2021) yang menemukan bahwa kemiskinan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Belu [35]. Namun berbeda dengan penelitian Diba et al. (2018) yang menemukan pengaruh signifikan kemiskinan terhadap IPM di Jawa Timur [21], yang menunjukkan bahwa pengaruh kemiskinan terhadap pembangunan manusia dapat berbeda antar wilayah tergantung pada konteks lokal dan kebijakan yang diterapkan.

4.4.2 Pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan jumlah pengangguran tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap perubahan IPM di Kabupaten Sambas.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif. Pertama, komposisi pengangguran di Kabupaten Sambas didominasi oleh pengangguran terdidik, yaitu lulusan SMA sederajat dan sarjana/diploma [36]. Meskipun mereka sedang mencari pekerjaan, tingkat pendidikan yang tinggi telah berkontribusi positif terhadap komponen pengetahuan dalam IPM. Data BPS menunjukkan bahwa indikator

pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah terus meningkat, yang mencerminkan peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi.

Kedua, pola pengangguran yang bersifat friksional dan struktural. Pengangguran friksional terjadi ketika lulusan baru memerlukan waktu untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Dalam periode transisi ini, meskipun status mereka adalah pengangguran, mereka telah berkontribusi pada peningkatan modal manusia melalui pencapaian pendidikan. Pengangguran struktural yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja juga mencerminkan adanya transformasi ekonomi dan peningkatan standar kualifikasi tenaga kerja.

Ketiga, dukungan keluarga dan jejaring sosial yang kuat dalam masyarakat Kabupaten Sambas. Sistem kekeluargaan yang masih kuat memungkinkan pengangguran tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga tidak berdampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan secara agregat.

Keempat, adanya sektor informal dan ekonomi kreatif yang menjadi penyangga bagi pengangguran. Banyak pengangguran, khususnya lulusan muda, yang terlibat dalam usaha mikro, online business, atau pekerjaan paruh waktu yang tidak tercatat dalam statistik ketenagakerjaan formal. Aktivitas ekonomi informal ini tetap berkontribusi pada pendapatan dan kesejahteraan, meskipun statusnya masih diklasifikasikan sebagai pengangguran atau setengah pengangguran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Naibaho dan Nabila (2021) yang menemukan pengaruh tidak signifikan dari pengangguran terhadap IPM di Kabupaten Langkat [25]. Namun berbeda dengan penelitian Faizin (2021) yang menemukan pengaruh negatif signifikan di Jawa Timur [24], menunjukkan bahwa pengaruh pengangguran terhadap pembangunan manusia sangat kontekstual dan bergantung pada karakteristik daerah.

4.4.3 Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Koefisien regresi sebesar 0,1009 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam belanja pendidikan akan meningkatkan IPM sebesar 0,1009 poin, dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan ini sesuai dengan hipotesis penelitian dan sejalan dengan teori modal manusia serta teori pertumbuhan endogen yang menekankan peran penting investasi pendidikan dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Signifikansi pengaruh belanja pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pertama, peningkatan alokasi anggaran pendidikan dari Rp. 253,63 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp. 588,68 miliar pada tahun 2022 menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Alokasi ini telah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan minimal 20% dari APBD dialokasikan untuk pendidikan.

Kedua, belanja pendidikan yang meningkat telah berdampak pada perbaikan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi, penyediaan fasilitas pembelajaran yang lebih baik, dan perluasan akses pendidikan hingga ke daerah terpencil. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan berbagai program beasiswa telah membantu mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, sehingga meningkatkan partisipasi sekolah.

Ketiga, investasi pendidikan memiliki efek multiplier yang luas. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya meningkatkan komponen pengetahuan dalam IPM (melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah), tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, inovasi, dan daya saing ekonomi daerah dalam jangka panjang. Masyarakat yang terdidik cenderung memiliki kesadaran kesehatan yang lebih baik, kemampuan mengakses informasi yang lebih luas, dan kapasitas untuk meningkatkan pendapatan.

Keempat, sesuai dengan teori Wagner dan Rostow, perkembangan ekonomi memerlukan proporsi belanja negara yang meningkat, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan. Pemerintah memegang peran kunci dalam mengembangkan sistem dan fasilitas pendidikan yang berkualitas sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan daerah.

Kelima, pendidikan merupakan prasyarat penting untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Menurut Todaro dan Smith (2011), pendidikan adalah salah satu komponen utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan karena meningkatkan kapabilitas individu untuk membuat pilihan hidup yang lebih baik [17]. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian empiris sebelumnya. Sanggelorang et al. (2015) menemukan pengaruh positif signifikan belanja pendidikan terhadap IPM di Sulawesi Utara [14]. Mongan (2019) juga menemukan hasil serupa di tingkat nasional Indonesia [28]. Amar dan Satria (2021) menemukan pengaruh positif signifikan di Kabupaten Bangka [27]. Konsistensi temuan ini mengindikasikan bahwa investasi pendidikan merupakan strategi universal yang efektif untuk meningkatkan pembangunan manusia.

4.4.4 Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah positif (0,0219), namun pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik. Temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan.

Ketidaksignifikan pengaruh belanja kesehatan terhadap kesejahteraan dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif. Pertama, meskipun alokasi anggaran kesehatan telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mewajibkan minimal 10% dari APBD untuk kesehatan (di luar gaji), namun kualitas pelayanan kesehatan masih menjadi permasalahan. Penelitian Yanti (2016) menemukan bahwa kualitas layanan kesehatan di beberapa daerah Kabupaten Sambas masih belum memadai, seperti kurang maksimalnya penanganan pasien, pengelolaan prosedur pengobatan yang belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, dan kelengkapan alat medis yang masih terbatas [37].

Kedua, efektivitas belanja kesehatan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan dikelola. Permasalahan seperti distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, akses terhadap fasilitas kesehatan yang masih terbatas di daerah terpencil, dan sistem rujukan yang belum optimal dapat mengurangi dampak positif dari peningkatan belanja kesehatan.

Ketiga, adanya time lag antara investasi kesehatan dengan dampaknya terhadap indikator kesehatan masyarakat. Investasi di bidang kesehatan seperti pembangunan puskesmas, pengadaan peralatan medis, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan memerlukan waktu untuk memberikan dampak yang terukur pada indikator IPM, khususnya komponen Angka Harapan Hidup.

Keempat, faktor-faktor di luar sistem kesehatan formal juga mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Pola hidup, sanitasi lingkungan, akses terhadap air bersih, dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan memainkan peran penting dalam menentukan status kesehatan. Belanja pemerintah di bidang kesehatan yang fokus pada layanan kuratif mungkin kurang efektif dibandingkan dengan pendekatan promotif dan preventif yang komprehensif.

Kelima, disparitas geografis dan sosial ekonomi dalam akses layanan kesehatan. Kabupaten Sambas memiliki wilayah yang luas dengan geografis yang beragam, sehingga tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap fasilitas kesehatan berkualitas. Masyarakat di daerah terpencil atau pulau-pulau kecil mungkin masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, meskipun anggaran kesehatan telah meningkat.

Keenam, prioritas masyarakat dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Terdapat kemungkinan bahwa sebagian masyarakat masih mengandalkan pengobatan tradisional atau alternatif, sehingga peningkatan fasilitas kesehatan formal tidak sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Fajar dan Indrawati (2020) menemukan pengaruh tidak signifikan belanja kesehatan terhadap IPM di Kabupaten Cianjur [29]. Namun berbeda dengan penelitian Muliza et al. (2017) yang menemukan pengaruh positif signifikan di Provinsi Aceh [8],

menunjukkan bahwa efektivitas belanja kesehatan terhadap pembangunan manusia sangat bergantung pada konteks lokal dan kualitas implementasi program.

4.5 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa implikasi kebijakan dapat dirumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas:

1. **Optimalisasi Belanja Pendidikan** Mengingat belanja pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan, pemerintah daerah perlu mempertahankan dan meningkatkan komitmen alokasi anggaran pendidikan. Fokus tidak hanya pada kuantitas anggaran, tetapi juga pada kualitas penggunaan anggaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, fasilitas sekolah, dan kompetensi guru.
2. **Perbaikan Kualitas Layanan Kesehatan** Meskipun belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan, pemerintah perlu melakukan refocusing anggaran kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan. Hal ini mencakup perbaikan sistem rujukan, distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata, pengadaan peralatan medis yang memadai, dan peningkatan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.
3. **Program Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi** Program penanggulangan kemiskinan perlu diperbaiki dengan melakukan pemetaan yang lebih akurat terhadap masyarakat miskin, perbaikan mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran, dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha mikro, dan pengembangan produk lokal.
4. **Strategi Pengurangan Pengangguran yang Komprehensif** Pemerintah perlu mengembangkan strategi pengurangan pengangguran yang komprehensif melalui pemberian pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk menciptakan produk daerah, pengembangan sektor ekonomi digital dan ekonomi kreatif, fasilitasi link and match antara pendidikan dengan kebutuhan industri, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor dan menciptakan lapangan kerja baru.
5. **Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas Belanja Daerah** Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program pembangunan, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten Sambas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kemiskinan secara teoritis memiliki hubungan negatif dengan kesejahteraan, namun dalam konteks Kabupaten Sambas pengaruhnya tidak cukup kuat, kemungkinan karena distribusi pendapatan yang relatif merata dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan.
2. Jumlah pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Fenomena ini terjadi karena sebagian besar pengangguran merupakan pengangguran terdidik yang telah berkontribusi pada peningkatan komponen pendidikan dalam IPM, meskipun mereka sedang dalam proses mencari pekerjaan.
3. Belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Temuan ini mengkonfirmasi pentingnya investasi pendidikan sebagai strategi efektif untuk meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.
4. Belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Ketidaksignifikan ini mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran kesehatan perlu diikuti dengan perbaikan kualitas layanan dan sistem manajemen kesehatan yang lebih baik.
5. Secara simultan, jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, belanja pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas dengan kontribusi sebesar 86,91%.

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Kabupaten Sambas perlu mempertahankan dan meningkatkan komitmen alokasi anggaran pendidikan serta memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
2. Melakukan refocusing dan restrukturisasi belanja kesehatan dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan, pemerataan akses, dan perbaikan sistem manajemen kesehatan untuk memastikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Memperbaiki sistem pemetaan dan pendataan masyarakat miskin agar program bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan untuk memutus rantai kemiskinan.
4. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran, terutama pengangguran terdidik, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif untuk pengembangan ekonomi kreatif dan digital.
5. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pembangunan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.

5.2.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seperti investasi swasta, infrastruktur, kualitas lingkungan, dan modal sosial untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.
2. Memperpanjang periode penelitian untuk mengidentifikasi trend jangka panjang dan dampak kebijakan tertentu terhadap pembangunan manusia, serta melakukan analisis dengan menggunakan data panel untuk membandingkan antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
3. Menggunakan metode analisis yang lebih canggih seperti Vector Error Correction Model (VECM), Structural Equation Modeling (SEM), atau metode ekonometrika spasial untuk menganalisis hubungan kausalitas dan interdependensi antar variabel dengan lebih akurat.
4. Melakukan penelitian kualitatif atau mixed method untuk menggali lebih dalam faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti aspek budaya, sosial, dan kelembagaan.
5. Melakukan penelitian khusus tentang efektivitas program-program spesifik pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih operasional.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang telah menyediakan data untuk penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R.A. Mulia and N. Saputra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang," *Jurnal El-Riyasah*, vol. 11, no. 1, pp. 30-32, 2021.
- [2] A. Ranadhani, A.G. Kumenaung, and K.D. Tolosang, "Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2019," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 21, no. 02, pp. 228-239, 2021.
- [3] F. Fibrian and E. Widodo, "Analisis Jalur Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta," in *Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan*, 2016, pp. 256-263.
- [4] Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat 2022," 2022.
- [5] Badan Pusat Statistik, "Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, dan Jumlah Penduduk Miskin Sambas Tahun 2008-2018," 2019.
- [6] I. Maksum, "BPS: Pengangguran di Sambas Meningkat, Lapangan Kerja Sempit dan Angka Putus Sekolah Tinggi," *Tribun Pontianak*, Mar. 14, 2023. [Online]. Available:

<https://pontianak.tribunnews.com/amp/2023/03/14/bps-pengangguran-di-sambas-meningkat-lapangan-kerja-sempit-dan-angka-putus-sekolah-tinggi>

- [7] Moeljarto T., "Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi," Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- [8] M. Muliza, T. Zulham, and C. Seftarita, "Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 3, no. 1, pp. 51-69, 2017.
- [9] D. Hartono, "Determinan Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah," *Sosio E-Kons*, vol. 14, no. 2, pp. 155-163, 2022.
- [10] Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan Menurut Kab/Kota," 2023.
- [11] Badan Pusat Statistik, "Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sambas 2022," 2022.
- [12] Badan Pusat Statistik, "Harapan Lama Sekolah Menurut Kab/Kota," 2024.
- [13] L.S. Hasibuan, Rujiman, and Sukardi, "Analisis determinan indeks pembangunan manusia (ipm) di indonesia," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, vol. 5, no. 2, pp. 139-141, 2020.
- [14] S.M. Sanggelorang, V.A. Rimate, and H.F.D. Siwu, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 15, no. 02, pp. 1-11, 2015.
- [15] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, "Data Series APBD," 2024.
- [16] E. Suharto, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat," Bandung: Refika Aditama, 2006.
- [17] M.P. Todaro and S.C. Smith, "Economic Development," United Kingdom: Pearson Education Limited, 2011.
- [18] United Nations Development Programme, "Human Development Report 1990," New York: Oxford University Press, 1990.
- [19] N. Budiarti, "Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Melalui Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota Provinsi Jawa Timur," Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 2019.
- [20] T. Supriyatna, "Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan," Bandung: Humaniora Utama Press, 1997.
- [21] A.O.F. Diba, M. Fathorrazi, and R.P. Somaji, "Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium*, vol. 2, no. 1, pp. 10-19, 2018.
- [22] D.D.G. Azzahra and D. Desmawan, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 34 Provinsi Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 3, pp. 22034-22044, 2023.
- [23] S. Sukirno, "Makro Ekonomi Modern," Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- [24] M. Faizin, "Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis*, vol. 12, no. 28, pp. 214-227, 2021.
- [25] M. Naibaho and U. Nabila, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Langkat," *Jurnal Gamma-Pi*, vol. 3, no. 2, pp. 21-26, 2021.
- [26] T.W. Schultz, "Investment in Human Capital," *American Economic Review*, vol. 51, no. 1, pp. 1-17, 1961.
- [27] H. Amar and A.L.M. Satria, "Pengaruh Belanja Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Bangka," in *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II*, 2021, pp. 276-291.
- [28] J.J.S. Mongan, "Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia," *Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, vol. 4, no. 2, pp. 163-176, 2019.
- [29] M.A. Fajar and L. Indrawati, "Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur)," *Indonesian Accounting Research Journal*, vol. 1, pp. 1-11, 2020.
- [30] E. Pasaribu and Septriani, "Pengujian Wagner's Law Versus Keynesian Hypothesis: Pendekatan Regional Indonesia," *The Journal of Economic Development*, vol. 2, no. 2, pp. 181-193, 2021.
- [31] J.M. Keynes, "The General Theory of Employment, Interest and Money," London: Macmillan, 1936.
- [32] I. Sutoyo, T.I.F. Rahma, and M.I. Harahap, "Dampak Usaha Tambak Udang Vanname Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Pantai Gading," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, vol. 1, no. 2, pp. 306-311, 2022.

- [33] C.C. Tumbuan, I.P.F. Rorong, and S.Y. Tumangkeng, "Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Manado," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 23, no. 2, pp. 121-132, 2023.
- [34] A. Sen, "Development as Freedom," Oxford University Press, 1999.
- [35] E.K. Kiha, S. Seran, and H.T. Lau, "Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) di kabupaten belu," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, vol. 2, no. 07, pp. 60-84, 2021.
- [36] "BPS: Pengangguran di Sambas Meningkat, Lapangan Kerja Sempit dan Angka Putus Sekolah Tinggi," *Tribun Pontianak*, 2023.
- [37] Yanti, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Pada Puskesmas Kecamatan Galing Kabupaten Sambas," *PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, vol. 5, no. 3, pp. 1-12, 2016.